

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Balik Kanan Izin Balapan

Istana mengizinkan balapan Formula E di sekitar Monas dengan sejumlah syarat. Berbeda dengan hasil rapat.

### Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** — Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka mengizinkan pemerintah DKI Jakarta menyelenggarakan balapan Formula E di kawasan Monumen Nasional, dengan empat catatan: merencanakan konstruksi dan fasilitas sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya, menjaga kelestarian pepohonan dan kebersihan, menjaga keamanan dan ketertiban; serta melibatkan instansi terkait guna menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan, dan cagar budaya.

Persetujuan itu tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno selaku ketua komisi pada Jumat, 7 Februari lalu. "Komisi Pengarah pada prinsipnya menyetujui rencana penyelenggaraan Formula E tahun 2020 di kawasan Medan Merdeka," demikian pernyataan Pratikno.

Persetujuan itu berbeda dengan pernyataan Sekretariat Negara dua hari sebelumnya. Rabu pekan lalu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengatakan Komisi Pengarah melarang pemerintah DKI menggunakan kawasan Monas sebagai sirkuit Formula E. Alasannya, Medan Merdeka merupakan kawasan cagar budaya. "Diizinkan, tapi di luar kawasan Monas," ujarnya, sesuai rapat mengenai revitalisasi Monas dan pelaksanaan Formula E di Sekretariat Negara, Rabu pekan lalu.

Sumber *Tempo* mengatakan rapat tersebut dihadiri formasi lengkap. Ada Gubernur Anies Baswedan selaku sekretaris merangkap anggota dan lima menteri anggota Komisi Pengarah. Mereka adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta Menteri Perhubungan Budi Karya. Rapat itu dipimpin Pratikno.

Pratikno, Siti, dan Wishnu, sumber itu melanjutkan, berkeberatan Formula E dilangsungkan di Monas. Tidak seperti klaim Anies bahwa balapan mobil listrik itu menyedot wisatawan, Wishnu menyatakan ajang itu belum terbukti mendatangkan pelancong secara masif layaknya Formula 1 atau MotoGP.

Penolakan Pratikno itu didasari status Taman Medan Merdeka sebagai kawasan cagar budaya. Sedangkan Siti tak mengizinkan balapan sebesar itu digelar terlalu dekat dengan Istana Negara. Nadiem dan Budi Karya, menurut sejumlah sumber, tidak memberikan pendapat.

Wishnutama mengatakan tidak menolak Formula E. "Yang saya sampaikan adalah kita hanya tahu *event* yang *exposure*-nya tinggi adalah MotoGP dan Formula 1. Kami perlu

dapat masukan soal Formula E ini."

Adapun Siti dan Budi Karya belum bisa dimintai konfirmasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan Budi Karya memang tidak banyak berpendapat dalam rapat itu. "Pak Menteri cuma sampaikan jangan di sekitar Istana yang ada jalan VVIP," kata Budi Setiyadi kepada *Tempo*, kemarin.

Sumber menuturkan, hingga menjelang akhir rapat, Komisi Pengarah tidak mengambil kesimpulan. Anies kemudian menanyakan soal kepastian penolakan atau persetujuan komisi akan pelaksanaan Formula E di Monas.

Pratikno disebutkan tidak memberikan jawaban tegas. Tapi rapat kemudian menyimpulkan bahwa Komisi Pengarah menolak balapan di Monas, tapi menyetujui renovasi kawasan Monas diteruskan. Pernyataan itulah yang disampaikan Setya Utama sesuai rapat.

Deddy Wahjudi, arsitek revitalisasi Monas yang ikut rapat tersebut, mengatakan forum memang menyepakati rute balap mobil tidak menyentuh Ruang Agung alias bagian dalam Monas. "Termasuk bagian tengah yang berupa jalan *cobblestone* (batu alam) itu," kata dia, kemarin. "Bagi kami, di Ruang Agung ada hierarki yang harus dijaga, bukan hanya fungsionalitas."

DKI pun bergerak mencari lokasi alternatif, se-

perti Gelora Bung Karno dan Sudirman Central Business District (SCBD). Pembahasan lintasan pengganti ini terus dilakukan meski pada Jumat sore lalu datang surat persetujuan balapan di Monas dari Sekretariat Negara.

Karena isi surat itu berbeda dengan hasil rapat, pemerintah DKI merahasikannya hingga memperoleh kejelasan. Anies disebutkan meminta waktu bertemu dengan Presiden Joko Widodo sepulang dari Australia tadi malam. Dalam "masa tunggu" pertemuan ini, surat dari Sekretariat Negara tersebut dibocorkan satu akun anonim di Twitter.

Anies enggan berkomentar soal persetujuan dari Sekretariat Negara itu. "Tanggapannya nanti," kata dia, kemarin.

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Balik Kanan Izin Balapan

Sadikin Aksa, yang hadir dalam rapat Komisi Pengarah sebagai Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, enggan menyampaikan isi pertemuan. Dia hanya mengatakan pengurus Federasi Balap Mobil Internasional, FIA, telah meninjau lokasi pada pekan lalu dan menyatakan lokasi itu layak dijadikan sirkuit dengan kategori *grade* 3. Dwi Wahyu Daryoto, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, yang turut hadir dalam pembahasan itu, juga menolak berkommentar. "Akan ada konferensi pers setelah penetapan jalur," ujar dia.

Adapun Setya belum memberikan penjelasan mengenai surat persetujuan itu. Pertanyaan *Tempo* melalui WhatsApp hanya dibaca tanpa dibalas. Sedangkan panggilan telepon tak kunjung dijawab hingga tenggat tulisan.

● YOHANES PASKALIS | IMAM  
HAMDI | FRANCISCO ROSARIANS |  
FRANCISCA CHRISTY

